

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan instrument perubahan sosial, salah satu yang mengatur tentang perubahan sosial adalah Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Berbijak dari Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 tersebut untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera maka setiap orang melakukan suatu aktifitas atau pekerjaan, misalnya ada yang jadi Pegawai Negeri Sipil, karyawan perusahaan wirausaha, wira swasta, petani, penambang dan lain-lain pekerjaan yang bisa menaikkan taraf hidup atau kesejahteraan. Salah satu yang bisa menaikkan kesejahteraan adalah penambang.

Kegiatan penambangan bisa berupa eksplorasi, eksploitasi, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan mineral bahan tambang. Menurut S.E. Rahim, penggolongan bahan-bahan galian adalah sebagai berikut : Golongan A; merupakan bahan galian strategis, yaitu strategis untuk perekonomian negara serta pertahanan dan keamanan negara. Golongan B merupakan bahan galian vital yaitu dapat menjamin hajat hidup orang banyak, contohnya : besi, tembaga, emas, perak dan lain-lain. Adapun

golongan C bukan merupakan bahan galian strategis ataupun vital, karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, contohnya : marmer, batu kapur, tanah liat, pasir yang sepanjang tidak mengandung unsur mineral.¹

Kondisi Kabupaten Wonogiri yang geografinya banyak bukit-bukit ternyata menyimpan berbagai macam bahan galian atau bahan tambang diantaranya : emas, tembaga, seng, timbal dan mangan. Dari lima logam itu potensi emas di Wonogiri di prediksi paling tinggi yakni mencapai 1,5 juta ton yang tersebar di empat kecamatan yakni : Selogiri, Jatiroto, Karangtengah, dan Tirtomoyo.²

Perusahaan pertambangan yang sudah masuk di Kabupaten Wonogiri ada dua yaitu PT. Aneka Tambang yang menggarap 5.711 hektar areal di Jatiroto, Jatisrono dan Tirtomoyo. Sedangkan PT. Alexis Perdana Mineral dengan areal 3.928 hektar di Selogiri, Wonogiri dan Wuryantoro. Selain kedua perusahaan tersebut, tidak kalah ramai adalah penambang tradisional atau para penambang rakyat yang keberadaannya sudah puluhan tahun dan jumlahnya ratusan orang atau penambang.

Para penambang rakyat tersebar di Kecamatan Selogiri bisa menghasilkan 10 kg emas pertahun dan di Jatiroto 15 kg emas pertahun dan di Hargosari Kecamatan Tirtomoyo.³

¹ S.E. Rahim. 2003. *Pengendalian Erosi Tanah Dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup*, Edisi Pertama. Jakarta : Bumi Aksara, hal. 7

² Solo Pos, 11 September 2012

³ Solo Pos co.id

Dalam melakukan proses penambangan, para penambang rakyat sebagian besar tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup.

Disadari atau tidak para penambang dalam melakukan pengelolaan memisahkan antara tanah atau batu yang mengandung emas dengan yang tidak limbahnya di buang langsung tanpa melalui proses terlebih dahulu, ada yang dibuang ke sungai. Pekarangan, parit. Apabila terjadi pencemaran mula-mula yang terkena adalah pelaku sendiri, kemudian orang yang ada di sekitar dan bahkan bisa radius yang jauh karena terbawa air sungai, sehingga hal ini bertentangan atau melanggar hak orang lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 69 ayat (1) berupa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.

Originalitas bahwa sebelumnya ada penelitian yang dilakukan oleh Heriamariaty Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya yang berjudul Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Penambang Emas di Sungai Kahayan.

Dian Endent Nur Fitriyana dengan judul Skripsi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Penambang Emas Tradisional (Studi Kasus tentang Relasi Sosial dan Strategi Bertahan Masyarakat Penambang Emas Tradisional di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri).

Dalam skripsi ini menitikberatkan relasi social yang terjadi antara masyarakat penambang emas tradisional dengan masyarakat disekitar lokasi pertambangan (sesama penambang, pemilik tanah, pengepul, serta pemerintah desa). Di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri serta bagaimana strategi bertahan yang dilakukan masyarakat penambang emas tradisional di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan usaha pertambangan emas tradisional.

Dalam penelitian ini menitikberatkan pada faktor-faktor penyebab penambangan emas dan penyebab terjadinya pencemaran air di Daerah Aliran Sungai Kahayan. Di samping itu upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang menitikberatkan tentang regulasi atau aturan dari pusat sampai daerah tentang pertambangan dan kemudian berusaha menemukan model untuk melakukan pencegahan pencemaran lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengolahan pertambangan emas tradisional di Kabupaten Wonogiri ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan dari pelaksanaan regulasi penambang di Kabupaten Wonogiri ?
3. Bagaiman model pengolahan pertambangan emas tradisional di Kabupaten Wonogiri ke depan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengolahan pertambangan emas tradisional di Kabupaten Wonogiri.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyimpangan dari regulasi penambang emas yang sudah memperoleh ijin dan yang belum memperoleh ijin.
- c. Untuk mengetahui model pengolahan pertambangan emas tradisional di Kabupaten Wonogiri ke depan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil ini diharapkan dapat dijadikan sumbang saran kepada pemerintah atau khususnya Kabupaten Wonogiri untuk menerapkan model pencegahan pencemaran lingkungan industri rumah tangga (penambang emas tradisional)

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi atau bacaan khususnya bagi ilmu hokum, lebih khususnya hukum lingkungan.

D. Landasan Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Hans Kelsen

Teori Hans Kelsen mendasarkan pada bidang sein dan sollen. Sein berhubungan dengan alam dan fakta (yang seluruhnya dikuasai oleh rumus sebab akibat). Sedangkan bidang sollen justru berkaitan dengan kehidupan manusia (yang dikuasai kebebasan dan tanggung jawab). Itulah sebabnya dalam bidang sollen digumuli soal kebebasan dan tanggung jawab.⁴ Manusia yang hidup ini memiliki kebebasan, dalam hidup bersama di masyarakat seseorang harus mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan ketertiban. Dalam kehidupan bersama yang tertib perlu dibuat suatu aturan yang dijadikan pedoman untuk dipatuhi di masyarakat. Pedoman yang dibuat dan dipatuhi inilah yang disebut hukum.

Jadi Hukum adalah aturan atau pedoman yang harus ditaati oleh semua masyarakat untuk mewujudkan ketertiban.

⁴ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Hlm. 126 Genta Publishing, Yogyakarta. 2010

Adapun menurut Hans Kelsen sumber dari aturan atau pedoman itu adalah *grundnorm* (norma dasar), seluruh peraturan-peraturan hukum menurut teori ini harus secara urut dan berpedoman pada *grundnorm*. Dengan melihat hal tersebut maka sebenarnya Kelsen juga membuat serta memperkenalkan teori tentang tertib yuridis.

- b. Hans Nawiasky, *Theorie Von Stufenufbau der rechtsordnung*, susunan norma menurut teori tersebut adalah :
 - a. Norma fundamental negara (*staats fundamentalnorm*)
 - b. Aturan dasar negara (*staats grundgesetz*)
 - c. Undang-undang formal (*formall gesetz*)
 - d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome sat zung*)

Attamimi dengan menggunakan teori Nawiasky, maka struktur tata hukum Indonesia adalah :

- a. *Staats fundamentalnorm* : Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
- b. *Staats grundgesetz* : Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan
- c. *Formall gesetz* : Undang-Undang
- d. *Verordnung en autonome sat zung* : Secara hierarkis mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan Bupati atau Walikota.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan perkembangan sarana tertentu atau frekuensi suatu fenomena tertentu dan juga preskriptif.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau sumber pertama. Sumber data primer berupa hasil wawancara langsung kepada penambang, pengepul dan masyarakat terkena dampak di lokasi penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak secara langsung memberi keterangan yang bersifat mendukung data primer, sumber data ini dapat dari : arsip, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan dilakukan dengan menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu semua undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, disamping itu juga ada aturan dalam

masyarakat yang tidak tertulis yang menjadi acuan bagi masyarakat tersebut untuk ditaati dan dilaksanakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi penulis secara sepihak dengan dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada penelitian. Hasil wawancara ini akan diolah kemudian dianalisis sebagai bahan untuk menambah dan melengkapi data dalam penyusunan tesis.

b. Quesioner

Yaitu metode pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Dinas Perijinan, Dinas ESDM, dan para penambang.

c. Observasi

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan oleh penulis adalah observasi pasif dimana peneliti dalam melakukan observasi tidak diketahui dan tidak memberitahu oleh subyek yang diteliti dimana sifatnya hanya mengamati

d. Dokumentasi

Merupakan suatu pengumpulan data dengan mengutip data yang diperlukan penulis yang tersedia di kantor instansi tertentu.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Wonogiri.

6. Teknik Analisis Data

Gambaran umum dari data yang ada dianalisis, adapun analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penyusun akan berusaha memaparkan dan disertai dasar hukum yang berlaku serta mencoba mengkaitkan data dari penelitian lapangan dengan objek yang diteliti.